



# Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Pantura Agro Wisata (PAS) Gemilang Kabupaten Sampang (Kajian Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, Dan Spasial)

Wahyudi Pramono

Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN)

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji perencanaan kawasan Pantura Agro Wisata (PAS) Gemilang di Kabupaten Sampang, yang bertujuan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pariwisata berbasis agribisnis di wilayah Pesisir Utara (Banyuates, Ketapang, dan Sokobanah). Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS). Penelitian ini mengumpulkan data primer melalui wawancara, dan observasi lapangan. Wawancara pada pemangku kepentingan dan masyarakat, serta data sekunder dari dokumen resmi dan laporan program. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman untuk mengidentifikasi potensi, sinergi sektoral, dan dampak program. Pendekatan THIS memungkinkan pemetaan strategis potensi agribisnis, kolaborasi lintas sektoral. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan destinasi wisata, kunjungan wisatawan, kemandirian desa wisata, dan pelaku usaha UMKM.

**Kata kunci:** Pariwisata berbasis Masyarakat, Agribisnis, Pendekatan THIS

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.6263>

\*Correspondence: Wahyudi Pramono

Email: [yudiwahyudi150569@gmail.com](mailto:yudiwahyudi150569@gmail.com)

Received: 12-10-2025

Accepted: 18-15-2025

Published: 01-12-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study examines the planning of the Pantura Agrowisata (PAS) Gemilang area in Sampang Regency, which aims to promote community economic independence through agribusiness-based tourism in the northern coastal areas (Banyuates, Ketapang, and Sokobanah). A descriptive qualitative approach was used with a thematic, holistic, integrative, and spatial (THIS) framework. This study collected primary data through interviews, field observations, stakeholder and community interviews, and secondary data from official documents and program reports. Data analysis was conducted using a descriptive qualitative model using the Miles and Huberman interactive model to identify potential, sectoral synergies, and program impacts. The THIS approach allows for strategic mapping of agribusiness potential and cross-sectoral collaboration. The results indicate an increase in tourism destinations, tourist visits, tourism village independence, and MSME business actors.

**Keywords:** Community-Based Tourism, Agribusiness, THIS Approach

## Pendahuluan

Kabupaten Sampang, yang terletak di bagian tengah Pulau Madura, memiliki potensi sumber daya alam yang signifikan, khususnya di wilayah pesisir utara (Pantai Utara/Pantura) (Annafiyah et al, 2022). Kawasan ini menyimpan kekayaan agribisnis yang mencakup sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, serta potensi wisata alam seperti Pantai Lon Malang dan Air Terjun Toroan. Potensi tersebut merupakan modal strategis bagi pengembangan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata yang berkelanjutan.

Namun demikian, pengembangan pariwisata di Kabupaten Sampang menghadapi tantangan multidimensional. Tantangan pertama bersifat struktural, meliputi keterbatasan infrastruktur pendukung pariwisata serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan destinasi. Tantangan kedua, yang bersifat lebih mendasar, adalah tantangan sosial-budaya. Masyarakat Sampang yang mayoritas bersuku Madura memiliki keterikatan kuat terhadap nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal, khususnya prinsip penghormatan terhadap Bupa, Babu, Guru, dan Ratoh, yang berfungsi sebagai landasan etika sosial dan tata kehidupan bermasyarakat (Qomariyah et al, 2024) (Siregar et al, 2024) (Suning et al, 2023). Hal ini membentuk dan masih menyisakan adanya pola pikir konservatif yang memandang pariwisata sebagai potensi ancaman terhadap moralitas dan identitas religius, sehingga menimbulkan resistensi terhadap pembangunan fasilitas wisata.

Resistensi sosial terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten Sampang bukan sekadar persoalan persepsi, melainkan merupakan fenomena sosial yang nyata dan berulang dalam praktik pembangunan kawasan wisata. Dalam konteks lokal, resistensi ini muncul dalam bentuk keberatan sebagian masyarakat terhadap pembangunan fasilitas wisata di sekitar permukiman, kekhawatiran terhadap aktivitas wisata yang dipersepsikan membuka ruang bagi perilaku yang tidak selaras dengan norma agama dan adat setempat, serta rendahnya kepercayaan terhadap aktor eksternal yang dianggap kurang memahami nilai-nilai lokal. Kuatnya internalisasi nilai keagamaan dan prinsip Bupa, Babu, Guru, Ratoh mendorong sikap kehati-hatian masyarakat terhadap perubahan sosial yang berpotensi menggeser otoritas tradisional dan tatanan moral. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek sosial-budaya tidak dapat diposisikan sebagai faktor pendukung semata, melainkan sebagai variabel kunci yang secara langsung memengaruhi tingkat penerimaan masyarakat, keberlanjutan program, serta efektivitas kebijakan pengembangan pariwisata.

Dalam merespons tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sampang menginisiasi program Pantura Agro Wisata (PAS) Gemilang sejak tahun 2020. Program ini dirancang sebagai inovasi perencanaan kawasan pariwisata berbasis masyarakat di wilayah Pantura—meliputi Kecamatan Banyuates, Ketapang, dan Sokobanah—dengan mengintegrasikan potensi agribisnis, produk kreatif lokal, serta nilai-nilai sosial-budaya masyarakat setempat (Peraturan Bupati, 2022). Inisiatif ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menegaskan bahwa pembangunan pariwisata harus menjunjung tinggi norma agama, nilai budaya, kearifan lokal, serta pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pelaku utama (Faricha & Shokhikah, 2024).

Program PAS Gemilang merupakan studi kasus yang kompleks karena berupaya menyatukan perencanaan wilayah, pengembangan ekonomi lokal, dan rekayasa sosial-budaya secara simultan (Imadoeddin et al, 2022). Kompleksitas tersebut tercermin dari kebutuhan untuk menjembatani tujuan pembangunan ekonomi daerah dengan realitas sosial masyarakat yang masih menunjukkan resistensi terhadap aktivitas pariwisata. Meskipun demikian, kajian akademik yang secara mendalam menganalisis bagaimana strategi perencanaan dan pengembangan PAS Gemilang dirumuskan dan diimplementasikan masih relatif terbatas. Terdapat kesenjangan pengetahuan dalam memahami efektivitas keterpaduan program ini, baik dari aspek tematik (kesesuaian

potensi), holistik (keterlibatan pemangku kepentingan), integratif (lintas sektor), maupun spasial (pola keruangan kawasan).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi perencanaan dan pengembangan Kawasan Pantura Agro Wisata (PAS) Gemilang di Kabupaten Sampang dengan menempatkan resistensi sosial-budaya masyarakat sebagai variabel kunci dalam proses perencanaan kebijakan pariwisata. Analisis ini diarahkan untuk mengevaluasi sejauh mana strategi yang diterapkan mampu menjembatani kepentingan pembangunan ekonomi daerah dengan perlindungan nilai-nilai sosial, agama, dan kearifan lokal masyarakat pesisir. Untuk membedah kompleksitas tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS), yang memungkinkan analisis komprehensif tidak hanya terhadap aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga terhadap keselarasan kebijakan pariwisata dengan konteks sosial-budaya dan karakteristik keruangan wilayah Sampang.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis strategi perencanaan dan pengembangan Kawasan Pantura Agro Wisata (PAS) Gemilang di Kabupaten Sampang (Sugiyono, 2018). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pemahaman mendalam terhadap dinamika kebijakan, aktor, serta konteks sosial-budaya yang memengaruhi implementasi program pariwisata berbasis masyarakat. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interviews) dan observasi lapangan terstruktur. Informan wawancara dipilih secara purposive berdasarkan peran, kewenangan, dan keterlibatan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengelolaan PAS Gemilang (Moleong, 2018). Pemangku kepentingan yang diwawancarai meliputi: (1) perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sektor pariwisata, pertanian, dan perencanaan wilayah; (2) pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai aktor pengelola destinasi; (3) pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terlibat dalam pengembangan ekonomi lokal; serta (4) perwakilan Kelompok Tani sebagai pelaku utama agribisnis pendukung wisata. Pemilihan informan dilakukan hingga mencapai data saturation, yaitu ketika informasi yang diperoleh telah bersifat berulang dan tidak menghasilkan temuan baru yang signifikan. Observasi lapangan dilakukan secara sistematis di tiga lokasi utama PAS Gemilang, yaitu Pantai Lon Malang, Kampung Melon Napote, dan Agrowisata Bukit Kombang. Observasi difokuskan pada kondisi fisik kawasan, aktivitas wisata, keterlibatan masyarakat, serta keterkaitan fungsi antar lokasi dalam satu kesatuan kawasan pariwisata. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen resmi dan literatur terkait (Bungin, 2009), yang mencakup Dokumen Inovasi PAS Gemilang (2023), Rencana Aksi Pantura (2022), serta Peraturan Bupati Sampang Nomor 54 Tahun 2022. Dokumen-dokumen ini digunakan untuk menelusuri kerangka kebijakan, arah perencanaan, serta dasar regulatif pengembangan kawasan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengacu pada model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara simultan dan berulang (Miles et al, 2014). Seluruh data dianalisis menggunakan kerangka pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) untuk mengidentifikasi kesesuaian potensi kawasan, tingkat keterlibatan pemangku

kepentingan, sinergi lintas sektor, serta keterkaitan keruangan antar lokasi wisata. Untuk menjamin validitas dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan beberapa teknik trustworthiness, antara lain: (1) triangulasi sumber dengan membandingkan data hasil wawancara antar pemangku kepentingan; (2) triangulasi metode melalui penggabungan wawancara, observasi, dan studi dokumen; serta (3) member checking terbatas dengan mengonfirmasi temuan kunci kepada informan utama. Selain itu, pencatatan lapangan dan dokumentasi dilakukan secara sistematis untuk meminimalkan bias peneliti dan memperkuat ketelusuran data.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Strategi Perencanaan Tematik: Agribisnis sebagai Identitas

Strategi perencanaan tematik (Beltramo et al., 2025), merupakan pilar sentral dalam keberhasilan awal program Pantura Agro Wisata (PAS) Gemilang, yang tidak hanya berfungsi sebagai penentu arah pengembangan produk, tetapi juga sebagai instrumen kunci untuk rekayasa sosial-budaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan tema "Agribisnis dan Edutani" bukanlah keputusan yang diambil dalam ruang hampa. Tema ini dirumuskan secara spesifik sebagai respons strategis terhadap tantangan utama yang diidentifikasi dalam pendahuluan yaitu masih adanya resistensi sosial-budaya dari masyarakat Pantura.

Data wawancara dengan OPD mengonfirmasi bahwa kata "pariwisata" (*tourism*) itu sendiri dipersepsikan secara negatif oleh sebagian masyarakat, karena diasosiasikan dengan aktivitas hiburan (entertainment), potensi degradasi moral, dan ancaman terhadap identitas religius. Dalam kerangka Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory-SET*), masyarakat lokal mempersepsikan "biaya" (*cost*) sosial dan moral dari pariwisata lebih tinggi daripada "manfaat" (*benefit*) ekonomi yang ditawarkan (Alamineh et al, 2023) (Liu & Li, 2018) (Zamani-Farahani & Musa, 2012) (Andereck et al, 2005)

Menghadapi resistensi nilai di tingkat masyarakat, pemerintah daerah tidak menggunakan pendekatan konfrontatif, melainkan menerapkan strategi pembingkai ulang (*reframing*) untuk mengubah cara pandang publik terhadap aktivitas wisata berbasis pertanian (Sulaiman et al, 2019). Reframing dilakukan melalui penggunaan istilah dan narasi baru seperti "Agrowisata" dan "Edutani" (Edukasi Tani) yang menekankan fungsi pendidikan, bukan hiburan semata (Andini et al, 2022). Strategi ini menggeser orientasi dari pariwisata yang dipersepsikan memiliki biaya moral atau kesia-siaan waktu menjadi aktivitas pembelajaran dan transfer pengetahuan yang memberi manfaat sosial kolektif (Chen et al, 2020). Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai luhur seperti ilmu, gotong royong, dan kemandirian ekonomi, narasi pendidikan dalam agrowisata memiliki valensi positif dan lebih mudah diterima karena selaras dengan struktur nilai sosial-budaya lokal (Chen et al, 2020). Contoh konkret dari penerapan strategi ini dapat dilihat pada Kampong Melon Napote, di mana kegiatan memetik melon, pembibitan, dan pembelajaran budidaya diletakkan sebagai inti atraksi wisata, sehingga masyarakat tidak memandangnya sebagai hiburan kosong, tetapi sebagai kegiatan edukatif berbasis praktik (Lailiyah et al, 2025). Dengan demikian, edutani menjadi instrumen sosial untuk membangun penerimaan publik, memperkuat legitimasi kebijakan pariwisata desa, dan

mengoptimalkan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan norma sosial dan identitas budaya lokal.

Transformasi tema dari “ancaman” menuju “pengembangan” dalam pengembangan PAS Gemilang menunjukkan adanya proses reframing pariwisata yang berangkat dari identitas agraris masyarakat setempat. Penguatan tema agribisnis menjadikan pariwisata bukan sebagai intervensi luar yang berpotensi mengganggu nilai sosial dan moral, tetapi sebagai kelanjutan logis dari aktivitas pertanian yang telah menjadi bagian integral kehidupan masyarakat Madura. Dengan demikian, pariwisata diposisikan sebagai sarana penguatan sektor agribisnis yang telah ada, bukan sebagai sektor baru yang berpotensi menggeser struktur ekonomi lokal. Pergeseran persepsi tersebut tercermin dari temuan kuesioner yang menunjukkan peningkatan penerimaan masyarakat pasca-sosialisasi tema agribisnis (Adityaji et al, 2022) (Kurniasari, 2021), sejalan dengan prinsip *Social Exchange Theory* bahwa dukungan masyarakat akan muncul apabila manfaat yang diperoleh dianggap lebih besar daripada biaya sosial yang harus ditanggung (Rahman et al., 2024). Masyarakat mulai melihat manfaat konkret berupa peluang pengembangan pertanian, peningkatan keterampilan, dan potensi ekonomi yang dirasakan secara langsung, sehingga kekhawatiran terhadap ancaman moral dan budaya cenderung berkurang.

## 2. Strategi Perencanaan Holistik: Kolaborasi dan Pemberdayaan

Strategi perencanaan holistik diidentifikasi sebagai pilar fundamental untuk mengatasi tantangan rendahnya partisipasi masyarakat di Pantura. Pendekatan ini secara radikal mengubah paradigma perencanaan dari yang sebelumnya bersifat *top-down* (dari atas ke bawah) menjadi *bottom-up* (dari bawah ke atas), yang merupakan implementasi inti dari model *Community-Based Tourism* (CBT) atau pariwisata berbasis masyarakat (Said & Wilopo, 2024). Temuan bahwa masyarakat dilibatkan sejak awal sebagai subjek (pelaku) pembangunan, bukan sekadar objek (penerima manfaat), mencerminkan pergeseran signifikan dalam tangga partisipasi. Mengacu pada kerangka “*Ladder of Citizen Participation*” (Arnstein, 1969), strategi PAS Gemilang berhasil mendorong tingkat partisipasi dari level “tokenisme” (sekadar konsultasi atau informasi) menuju level “*citizen power*” (kekuatan warga), di mana masyarakat melalui Pokdarwis dan BUMDes mendapatkan pendelegasian wewenang dan masuk dalam kemitraan pengambilan keputusan.

Mekanisme holistik ini diwujudkan melalui dua jalur yang saling memperkuat: horizontal dan vertikal. Secara horizontal, temuan mengenai kolaborasi kuat lintas OPD teknis (Disporabudpar, DPRKP, Disperta KP, DPMD) adalah aplikasi nyata dari konsep *Collaborative Governance* dengan pendekatan *whole-of-government* (Hibatullah et al., 2024). Hal ini sangat relevan dengan Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*), yang menegaskan bahwa keberlanjutan pariwisata dalam konteks yang kompleks tidak dapat dicapai secara sektoral, melainkan membutuhkan orkestrasi multi-aktor untuk menyatukan sumber daya (anggaran, keahlian) dan menyelaraskan tujuan. Secara vertikal, program ini menerapkan Teori Pemberdayaan (*Empowerment Theory*) secara langsung. Pemberdayaan tidak berhenti pada pelibatan fisik, tetapi fokus pada *capacity building* (peningkatan

kapasitas) melalui pelatihan tata kelola destinasi dan manajemen UMKM. Proses ini secara efektif mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan wewenang dari pemerintah kepada masyarakat. Bukti empiris dari keberhasilan transfer kapasitas ini adalah temuan observasi di Pantai Lon Malang, di mana pengelolaan operasional kini telah mandiri dijalankan oleh BUMDes dan Pokdarwis setempat. Dengan demikian, strategi holistik ini tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi yang lebih penting, membangun modal sosial (*social capital*)—berupa kepercayaan (*trust*) dan jaringan kolaboratif (*networks*) antara pemerintah dan masyarakat—yang menjadi fondasi esensial untuk keberlanjutan program jangka panjang.

### 3. Strategi Perencanaan Integratif: Sinergi Kebijakan dan Anggaran

Strategi perencanaan integratif merupakan pilar krusial dalam keberhasilan PAS Gemilang, yang diwujudkan melalui dua instrumen utama: legalitas formal dan sinergi pendanaan. Pertama, penetapan Peraturan Bupati (Perbup) Sampang Nomor 54 Tahun 2022 berfungsi sebagai payung kelembagaan (*institutional umbrella*). Dalam perspektif teori Pemerintahan Kolaboratif (*Collaborative Governance*), Perbup ini lebih dari sekadar dokumen legal; ia bertindak sebagai instrumen formal yang memaksa dan melegitimasi koordinasi lintas-sektor. Peraturan ini secara strategis memitigasi tantangan klasik administrasi publik, yaitu ego sektoral, dengan memberikan mandat yang jelas kepada berbagai OPD (seperti Disporabudpar, DPRKP, dan Disperta KP) untuk bekerja di luar batas-batas birokrasi mereka demi satu tujuan Bersama (Novita et al, 2025).

Tanpa landasan hukum yang kuat ini, koordinasi seringkali gagal di tahap implementasi karena konflik kewenangan atau prioritas. Kedua, strategi integratif ini memecahkan masalah fundamental dalam pembangunan daerah, yakni fragmentasi anggaran. Temuan bahwa program ini tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi secara proaktif mengintegrasikan dana dari DAU, DAK, APBN, serta CSR BUMN dan swasta, menunjukkan pergeseran paradigma. Ini selaras dengan prinsip New Public Governance (NPG), di mana pemerintah tidak lagi bertindak sebagai satu-satunya penyandang dana, melainkan sebagai fasilitator jaringan (*network facilitator*). Dengan mengkonsolidasikan sumber daya dari berbagai level pemerintahan (vertikal) dan sektor swasta (horizontal), Pemda dapat mengatasi keterbatasan fiskal daerah. Integrasi pendanaan ini menjadi "bahan bakar" yang memungkinkan eksekusi proyek-proyek infrastruktur skala besar—seperti jalan dan SPAM—yang merupakan prasyarat mutlak bagi pengembangan kawasan wisata dan tidak mungkin dibiayai oleh satu dinas saja.

### 4. Strategi Perencanaan Spasial: Konektivitas dan Zonasi Kawasan

Strategi perencanaan spasial diimplementasikan sebagai fondasi fisik untuk menjawab tantangan keterbatasan infrastruktur dan mengatasi masalah potensi yang tersebar (*scattered potential*) di tiga kecamatan fokus. Pendekatan ini lebih dari sekadar pemetaan, melainkan merupakan aplikasi dari Teori Perencanaan Wilayah (Regional Planning Theory) yang berfokus pada intervensi keruangan secara terstruktur. Secara spesifik, strategi ini mengadopsi model node-linkage (simpul-jaringan). Dalam model ini,

destinasi wisata individu seperti Pantai Lon Malang, Kampung Melon Napote, dan Agrowisata Bukit Kombeng diposisikan sebagai nodes (simpul) atau pusat-pusat atraksi. Tantangan awalnya adalah nodes ini terisolasi akibat links (jaringan penghubung) yang lemah. Oleh karena itu, intervensi difokuskan pada penguatan links melalui pembangunan infrastruktur fisik, yang esensial menurut Teori Aksesibilitas (Accessibility Theory). Peningkatan jalan, seperti pada ruas Karang Penang-Tamberu, secara langsung mengurangi "gesekan jarak" (*friction of distance*), mempermudah pergerakan wisatawan, dan meningkatkan nilai ekonomis lokasi. Pada saat yang sama, penyediaan infrastruktur pendukung di dalam nodes—seperti PJU (Penerangan Jalan Umum) untuk keamanan dan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) untuk kenyamanan—bertujuan meningkatkan daya dukung dan kualitas destinasi itu sendiri. Dengan menghubungkan nodes yang kuat melalui links yang efisien, strategi ini berhasil membentuk zonasi pariwisata (*tourism zoning*) yang terpadu. Hasil akhirnya adalah terciptanya sebuah koridor wisata (*tourism corridor*) Pantura yang kohesif, mengubah destinasi-destinasi yang semula berdiri sendiri menjadi sebuah klaster pariwisata (*tourism cluster*) yang saling melengkapi dan memiliki daya jual kawasan yang jauh lebih tinggi.

## Pembahasan

### 1. Efektivitas Pendekatan THIS dalam Rekayasa Sosial-Budaya

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Tematik dalam kerangka THIS memainkan peran kunci dalam mereduksi resistensi sosial-budaya, yang sejak awal diidentifikasi sebagai hambatan non-fisik utama dalam pengembangan PAS Gemilang. Resistensi masyarakat Pantura Sampang dapat dipahami melalui perspektif Social Identity Theory (Tajfel & Turner, 1979), yang menjelaskan bahwa individu maupun komunitas berupaya mempertahankan *positive distinctiveness* dari kelompok sosialnya (*in-group*). Dalam konteks ini, nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal—termasuk prinsip Bupa, Babu, Guru, Ratoh—menjadi inti identitas kolektif masyarakat. Pariwisata konvensional dipersepsikan sebagai representasi *out-group* yang berpotensi membawa ancaman terhadap moralitas, otoritas tradisional, dan tatanan sosial, sehingga resistensi yang muncul dapat dipahami sebagai bentuk rasional dari perlindungan identitas sosial.

Menghadapi kondisi tersebut, temuan penelitian mengindikasikan bahwa pemilihan tema "Agrowisata" dan "Edutani" oleh Pemerintah Kabupaten Sampang bukan sekadar keputusan sektoral berbasis komoditas, melainkan strategi rekayasa sosial yang bersifat deliberatif. Strategi ini secara konseptual sejalan dengan *Framing Theory* (Entman, 1993), di mana aktor kebijakan secara selektif menonjolkan aspek tertentu dari sebuah isu untuk membentuk pemaknaan publik. Alih-alih membingkai pariwisata sebagai aktivitas rekreatif semata—yang berpotensi bertabrakan dengan norma lokal—Pemda melakukan *reframing* pariwisata sebagai wahana edukasi pertanian dan penguatan ekonomi keluarga.

Pendekatan pembedingkaian ini menghasilkan dampak sosial yang konkret. Secara sosial, terjadi penurunan sikap resistif yang tercermin dari meningkatnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi, khususnya melalui Pokdarwis dan

kelompok tani. Aktivitas wisata tidak lagi dipersepsikan sebagai ancaman eksternal, melainkan sebagai perpanjangan dari praktik agraris yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Secara psikososial, strategi ini mereduksi cognitive dissonance antara nilai lokal dan aktivitas pariwisata, sehingga meningkatkan penerimaan sosial terhadap program PAS Gemilang.

Strategi ini juga dapat dipahami sebagai penerapan prinsip Social Marketing, di mana “produk” pariwisata didesain ulang agar sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan sensitivitas sosial masyarakat sasaran. Dengan menurunkan “biaya sosial” berupa kekhawatiran terhadap degradasi moral, strategi tematik ini menciptakan prasyarat penting bagi implementasi Community-Based Tourism (CBT). Sejalan dengan Murphy (1985), keberlanjutan CBT sangat bergantung pada tingkat penerimaan dan kontrol komunitas lokal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembingkai tematik ini berkontribusi langsung pada diperolehnya social license to operate, yang kemudian membuka ruang partisipasi masyarakat secara lebih luas dan bermakna.

## **2. Keterpaduan Strategi sebagai Kunci Mengatasi Hambatan Struktural**

Selain resistensi sosial-budaya, penelitian ini mengidentifikasi dua hambatan struktural utama dalam implementasi PAS Gemilang, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan infrastruktur pendukung. Pembahasan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak ditentukan oleh satu strategi tunggal, melainkan oleh keterpaduan strategi dalam satu sistem kebijakan yang saling bergantung.

Pertama, tantangan rendahnya partisipasi masyarakat—yang pada tahap awal dipicu oleh resistensi sosial—diatasi melalui pendekatan Holistik. Pendekatan ini tidak berhenti pada pelibatan formal (participation by invitation), tetapi mendorong transformasi peran masyarakat dari objek pembangunan menjadi subjek dan pelaku utama. Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan Stakeholder Theory, yang menekankan bahwa keberlanjutan program publik bergantung pada kemampuan mengakomodasi kepentingan dan peran seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya aktor pemerintah.

Secara empiris, penguatan peran Pokdarwis dan BUMDes menghasilkan dampak sosial dan ekonomi yang nyata. Dari sisi sosial, tumbuh social capital berupa peningkatan kepercayaan (trust), jejaring kerja sama, dan kohesi sosial antara pemerintah dan masyarakat. Dari sisi ekonomi, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi mendorong munculnya unit-unit usaha lokal, seperti jasa wisata, penjualan produk agribisnis, dan ekonomi kreatif berbasis desa. Dampak ini memperkuat sense of ownership, yang menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pariwisata ketika intervensi pemerintah mulai berkurang.

Kedua, keterbatasan infrastruktur diatasi melalui sinergi antara strategi Integratif dan Spasial. Strategi integratif berfungsi sebagai mekanisme resource mobilization, yang memungkinkan lintas sektor dan lintas sumber pendanaan bekerja secara simultan. Melalui dukungan regulatif (Peraturan Bupati) dan skema pendanaan multi-sumber (APBN, APBD, dan CSR), program ini berhasil mengatasi fragmentasi kewenangan antar perangkat

daerah. Secara teoritis, temuan ini memperkuat argumen bahwa masalah infrastruktur dalam pariwisata bersifat lintas sektor dan membutuhkan tata kelola kolaboratif.

Strategi spasial memastikan bahwa investasi infrastruktur tersebut menghasilkan dampak ekonomi yang optimal. Dengan pendekatan perencanaan kawasan, destinasi wisata tidak dikembangkan secara terisolasi, tetapi dihubungkan dalam satu sistem keruangan. Temuan ini mengonfirmasi relevansi Regional Planning Theory yang membedakan antara pengembangan berbasis “titik” dan berbasis “jaringan”. Pembentukan koridor wisata Pantura memungkinkan peningkatan economic multiplier effect, yang tercermin dari meningkatnya mobilitas wisatawan antar destinasi, bertambahnya lama tinggal (*length of stay*), serta meningkatnya pengeluaran wisatawan di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa kekuatan PAS Gemilang terletak pada penerapan Systems Thinking. Strategi tematik berfungsi sebagai “pintu masuk” untuk meredakan hambatan sosial-budaya; strategi holistik membangun fondasi sosial dan kelembagaan; sementara strategi integratif dan spasial memperkuat fondasi ekonomi dan fisik kawasan. Ketidakhadiran salah satu elemen dalam sistem ini berpotensi melemahkan efektivitas program secara keseluruhan, sehingga menegaskan pentingnya perencanaan pariwisata yang bersifat terpadu, adaptif, dan sensitif terhadap konteks lokal.

## Simpulan

PAS Gemilang berhasil menerapkan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat di Kabupaten Sampang. Program ini telah menciptakan destinasi wisata baru, meningkatkan kunjungan wisata, dan mendukung kemandirian ekonomi melalui kolaborasi lintas sektoral dan pemberdayaan masyarakat. Tantangan seperti keterbatasan SDM dan infrastruktur dapat diatasi melalui penguatan kapasitas, investasi infrastruktur, dan promosi digital yang lebih intensif. Pendekatan THIS memberikan kerangka strategis yang komprehensif untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing destinasi wisata.

## Daftar Pustaka

- Adityaji, R., Bangso, F. D., Pradhipta, R. M. W. A., & 4, S. P. D. (2022). Dukungan Warga Lokal Untuk Perencanaan Pariwisata Dalam Krisis Pandemi Covid-19 Di Desa Wisata Peniwen: Sebuah Model Persamaan Struktural. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi*, 9(2), 838–851. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jmbi/article/view/41520%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jmbi/article/download/41520/38365>
- Alamineh, G. A., Hussein, J. W., Mulu, Y. E., & Taddesse, B. (2023). The Negative Cultural Impact of Tourism and Its Implication on Sustainable Development in Amhara Regional State. *Cogent Arts and Humanities*, 10(1), 1–27. <https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2224597>
- Andereck, K. L., Valentine, K. M., Knopf, R. C., & Vogt, C. A. (2005). Residents' Perceptions of Community Tourism Impacts. *Annals of Tourism Research*, 32(4), 1056–1076. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.annals.2005.03.001>

- Andini, A., Nugroho, S., & Suryawan, I. B. (2022). Tourism Planning Based on Educational Tourism in Agro-Tourism. *European Journal of Business and Management Research*, 7(4), 245–250. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2022.7.4.1544>
- Annafiyah, Maulidi, A., Kurniadin, N., & Wilujeng, A. D. (2022). Analisis Perubahan Garis Pantai Wilayah Pesisir Selatan Kabupaten Sampang Menggunakan Citra Landsat. *Sebatik*, 26(2), 439–445. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v26i2.1936>
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Beltramo, R., Taglio, I., & Bonadonna, A. (2025). Designing Thematic Tourist Trails for Local Development: A Framework Based on Territorial Heritage. *Land*, 14(10), 1943. <https://doi.org/10.3390/land14101943>
- Bungin, B. (2009). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana Prenada.
- Chen, T. P., Lee, K. Y., Kabre, P. M., & Hsieh, C. M. (2020). Impacts of Educational Agritourism on Students' Future Career Intentions: Evidence From Agricultural Exchange Programs. *Sustainability (Switzerland)*, 12(22), 1–19. <https://doi.org/10.3390/su12229507>
- Faricha, I. H., & Shokhikah, Z. K. (2024). Upaya Pelaksanaan Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Sampang Studi : Implementasi Pasal 8 Ayat ( 1 ) Undang-Undang No . 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 332–339. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/konstitusi.v1i4.249>
- Hibatullah, M. N., Fitriyah, & Marlina, N. (2024). Pendekatan Whole Of Government Dalam Pelayanan Publik Di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang. *Journal of Politic and Government Studies*, 13(1), 1–19. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/42411>
- Imadoeddin, Anam, S., Aristin, R., Hasbullah, & Rudiyanto, M. (2022). Partisipasi Masyarakat Pesisir Dalam Mengembangkan Destinasi Wisata Pantai Di Desa Camplong Kabupaten Sampang. *KOLONI: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(4), 599–606. <https://koloni.or.id/index.php/koloni/article/view/378>
- Kurniasari, K. K. (2021). Pariwisata Budaya Berkelanjutan: Persepsi Masyarakat Lokal. *Journal of Research on Business and Tourism*, 1(1), 62–74. <https://doi.org/10.37535/104001120215>
- Lailiyah, N., Anas, Z., Faisol, & Muntaha, H. (2025). Pengaruh Destinasi Agrowisata Kampung Melon Napote Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Bira Timur Kabupaten Sampang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, 4(1), 61–68. <https://journal.bengkuluinstitute.com/index.php/JEMAKBD/article/view/1220>
- Liu, X. (Rose), & Li, J. (Justin). (2018). Host Perceptions of Tourism Impact and Stage of Destination Development in a Developing Country. *Sustainability (Switzerland)*, 10(7), 1–15. <https://doi.org/10.3390/su10072300>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook 3rd Edition*. SAGE Publications.

- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Novita, A. A. A., Danar, O. R., Amirudin, A., & Ngindana, R. (2025). *Governance for Sustainable Development*. Selaras Media Kreasindo.
- Peraturan Bupati. (2022). *Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pantai Utara Agrowisata Sampang Gemilang*.
- Qomariyah, L. N., Hermawan, R., & Rosyidah, A. Al. (2024). Analisis Penerapan Smart Tourism sebagai Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Berkelanjutan di Pantai Lon Malang Kabupaten Sampang. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 114–121. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.99>
- Rahman, B., Ariyanto, E., & Sari, D. T. (2024). Analisis Dukungan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 7(1), 251–260. <https://pdfs.semanticscholar.org/f2e0/7c6f475026c03d1f81bb405fe5defc6350f7.pdf>
- Said, A., & Wilopo. (2024). *Kolaborasi Perencanaan Pembangunan*. Deepublish.
- Siregar, M., Lestari, R. A., Nasir, M., Tualeka, B. A., Fernandes, F., & Arifin, M. (2024). Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Sampang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 5(1), 83–97. <https://doi.org/10.29103/jspm.v5i1.11268>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif dan Deskriptif*. Alfabeta.
- Sulaiman, A. I., Chusmeru, C., & Kuncoro, B. (2019). The Educational Tourism (Edutourism) Development Through Community Empowerment Based on Local Wisdom and Food Security. *International Educational Research*, 2(3), 1–14. <https://doi.org/10.30560/ier.v2n3p1>
- Suning, S., Wahyuni, H., & Ratnawati, R. (2023). Kajian Pengembangan Kawasan Wisata Berkelanjutan di Pantai Lon Malang Kabupaten Sampang, Madura. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 19(4), 531–548. <https://doi.org/10.14710/pwk.v19i4.49835>
- Zamani-Farahani, H., & Musa, G. (2012). The Relationship Between Islamic Religiosity and Residents' Perceptions of Socio-Cultural Impacts of Tourism in Iran: Case studies of Sare'in and Masooleh. *Tourism Management*, 33(4), 802–814. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tourman.2011.09.003>